


PEREKONOMIAN INDONESIA (1966- 1987)



Aryan Eka Prastya Nugraha
2017

Kedatangan Belanda

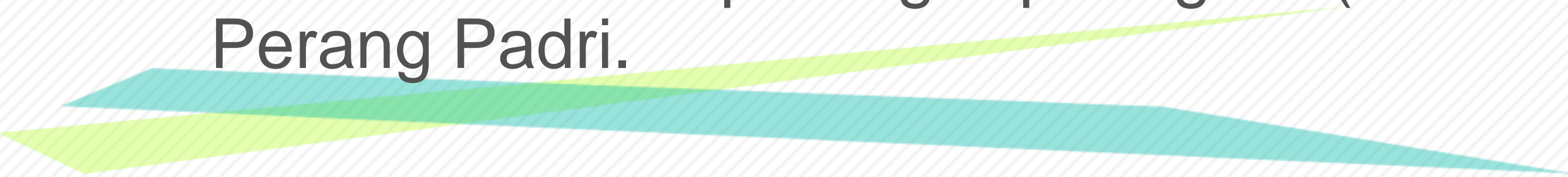
- Tahun 1596, armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman datang di Banten.
 - Tahun 1602 dibentuk VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah. VOC mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. Selain di Nusantara, VOC juga berkuasa di Afrika Selatan, dan India.
 - VOC bubar pada tahun 1799 karena gagal mengatasi krisis keuangannya.
- 

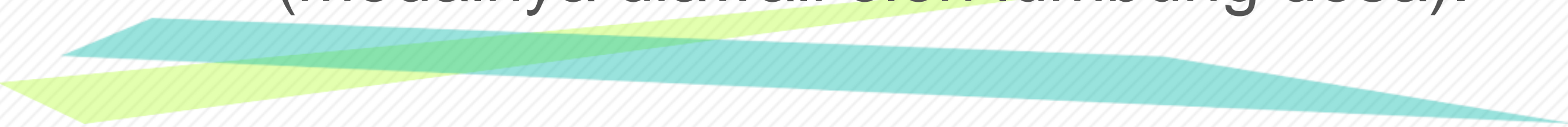
Zaman Kolonial

Culturstelsel (1830-1870)

Sistem **tanam paksa** melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi lahan pertanian & peternakan serta tenaga kerja secara gratis. Budidaya kopi, teh, tembakau, tebu, digalakkan (karena permintaan di pasar dunia tinggi).

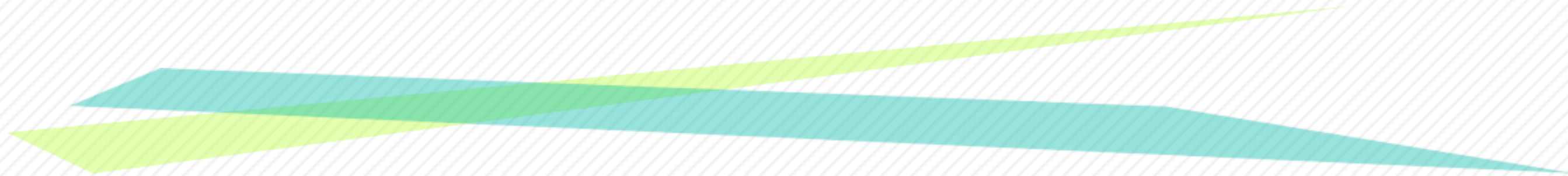
Belanda –dengan Gubernurnya Jenderal Van Den Bosch- pada masa tersebut membutuhkan uang untuk mendanai perang Diponegoro (1825-1829) dan Perang Padri.



- Tanam paksa berakhir pada tahun 1870, dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial. Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun.
 - Politik etis (balas budi) dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900an. Fokusnya: irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini lembaga perkreditan rakyat mulai muncul (modalnya diawali oleh lumbung desa).
- 

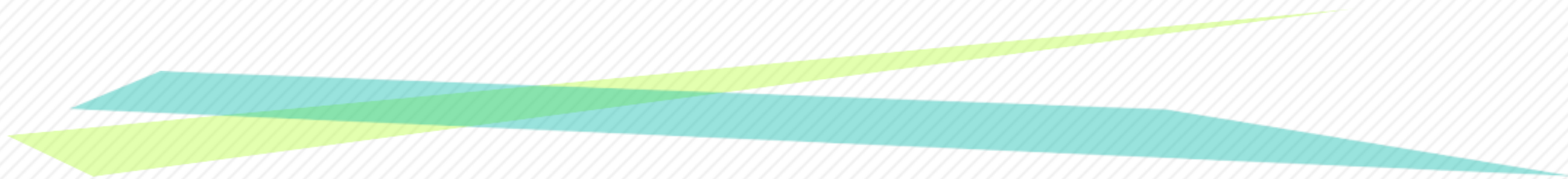
Versi Richard Robinson

Dalam bukunya *The Rise of Capital*, 1986, Robinson mencatat bahwa pada tahun 1930-an seluruh perkebunan Hindia Belanda mencapai luas hampir 3,8 juta hektar, ekspornya senilai 1,6 milyar gulden.

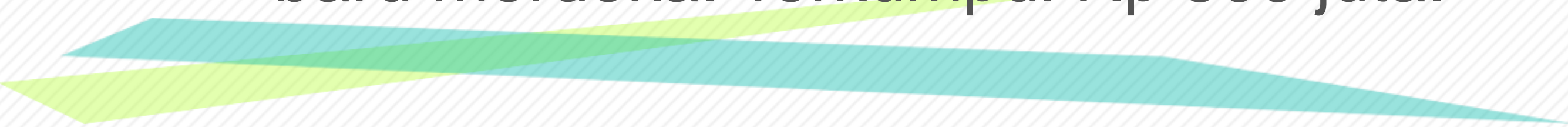


Kesenjangan

- Namun dari penerimaan Hindia Belanda yang sekitar 670 juta gulden, hanya sekitar 3,6 juta gulden (0,54%) yang diterima oleh 59,1 juta warga pribumi. Warga Tionghoa (1,3 juta orang) mendapatkan 0,4 juta gulden.
- Orang Belanda dan kulit putih (241.000 jiwa) menerima 665 juta gulden (99,4%).

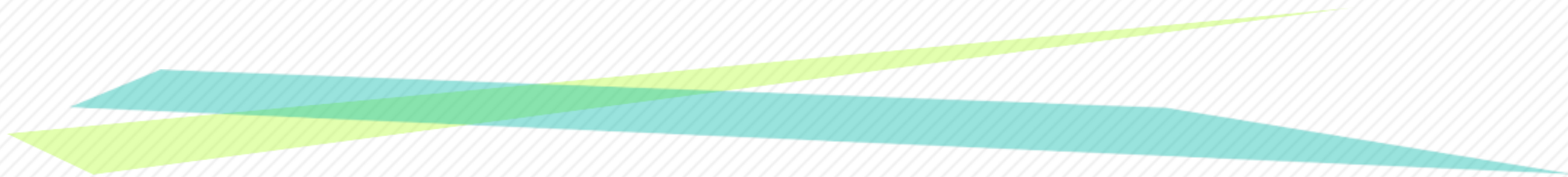


Kemerdekaan

- Masalah: hiperinflasi, karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Terdapat 3 jenis mata uang: uang keluaran De Javasche Bank, uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia Belanda.
 - Juli 1946 rakyat diminta menyetor uang ke Bank Tabungan Pos yang akan dipinjam Pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada Pemerintah yang baru merdeka. Terkumpul Rp 500 juta.
- 

- Tahun 1968, diterbitkan UU No 86 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda di Indonesia.
- Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal (karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kpd bursa Indonesia karena hiperinflasi)
- Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, Pemerintah menerbitkan Perpu No 2/ 1959 yang memotong nilai mata uang menjadi 1/ 10 (sepersepuluhnya).

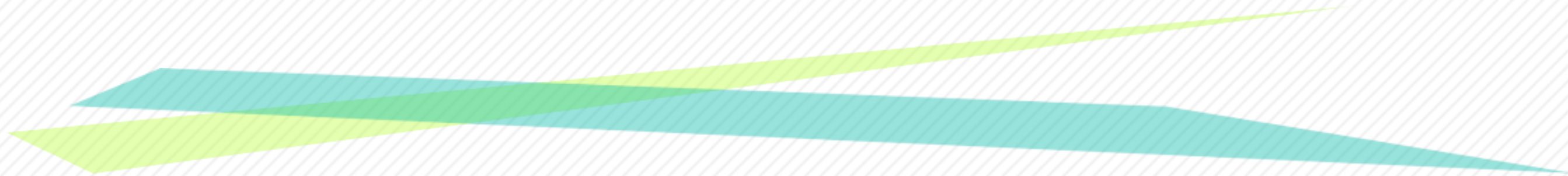
Selama periode 1950-1965 RI banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek 'nasionalisme' (dari mulai Monas, Patung Dirgantara, Stadion Utama Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, poros Jkt-Moscow-Peking, merebut Irian Barat, dsb) namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit.



Akhir Orde Lama

Masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar 11 Maret 1966, Soeharto resmi menjadi Presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 1967



Keberhasilan Orde Lama

Penyelenggaraan KTT Asia Afrika (20-24 April 1955 di Bandung)

Asian Games IV di Jakarta pada tahun 1962

Pembangunan infrastruktur seperti TVRI, jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, jalanan utama (Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto)

Menjadi tuan rumah Games of The Emerging Forces (Ganefo) pada tahun 1963



Kemandirian Bangsa

Dalam Sidang Umum III MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keluarnya RI dari PBB dan ditolaknyanya hutang IMF.

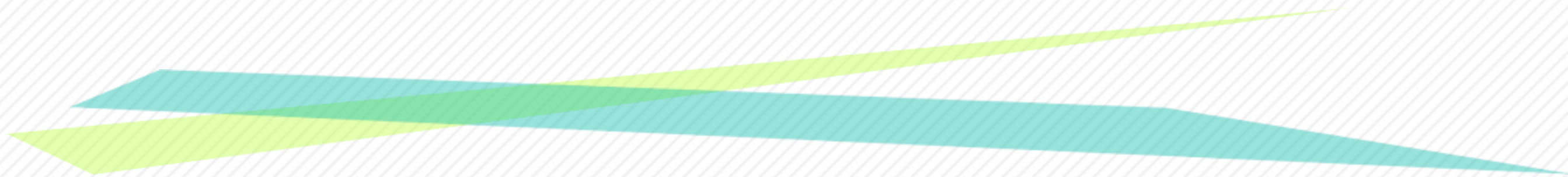


Kekurangan Orde Lama

Keluarnya Indonesia dari PBB pada tgl 7 Agustus 1964

Terbengkalainya perekonomian Indonesia (inflasi sampai dengan 650%)

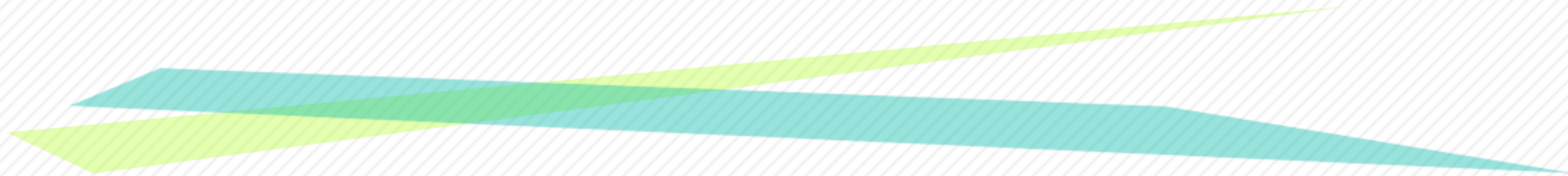
Situasi politik dalam negeri yang tidak menentu karena lebih memikirkan urusan politik luar negeri



Akhir Orde Lama

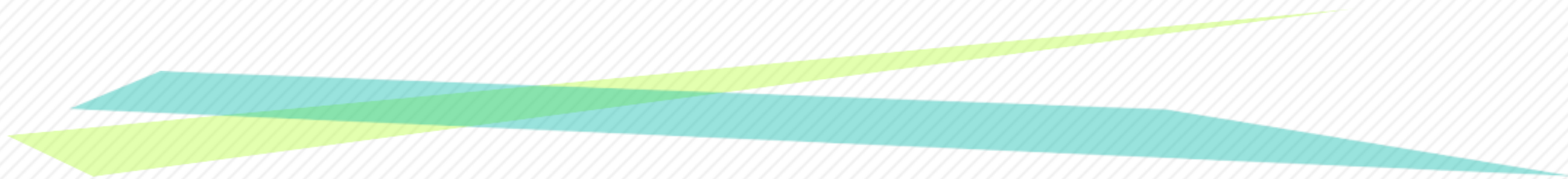
Masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar 11 Maret 1966, Soeharto resmi menjadi Presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 1967



Awal Pemerintahan

Sehari setelah diberi mandat Supersemar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI. Kemudian pada 25 Juli 1966 –setelah Soeharto diberi mandat MPRS- terbentuk kabinet baru bernama Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) yang dipimpin ‘presidium’ 3 (tiga) orang Soeharto (Ketua), Adam Malik (Luar Negeri), dan Sri Sultan HB IX (Perekonomian)



Warisan dari Periode Sebelumnya

Orde Baru mewarisi hutang Orla sebesar US\$ 530 juta (padahal pendapatan negara dari ekspor migas dan non migas hanya US\$ 430 juta)

Inflasi sebesar 650%, harga beras naik menjadi 900%.

Tim ekonomi Orba melakukan langkah pertama: turunkan defisit anggaran –dengan cara menurunkan pengeluaran Pemerintah.

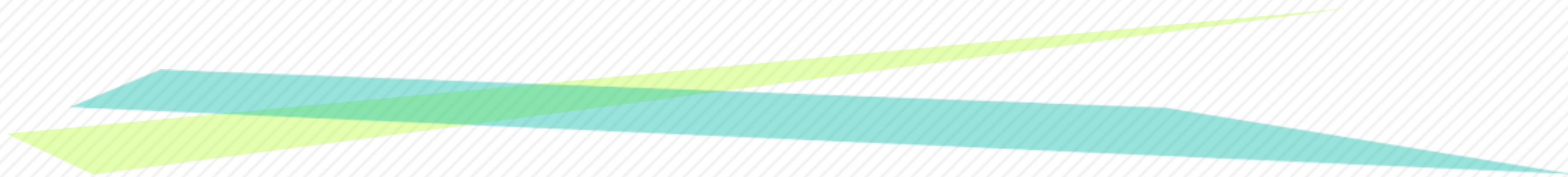
Menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional –terutama IMF dan Bank Dunia

Kebijakan Moneter Awal Orba

Tahun 1967 diberlakukan UU anggaran berimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat

Memakai bantuan LN untuk menutup defisit anggaran

Penerapan kebijakan uang ketat –untuk menurunkan inflasi

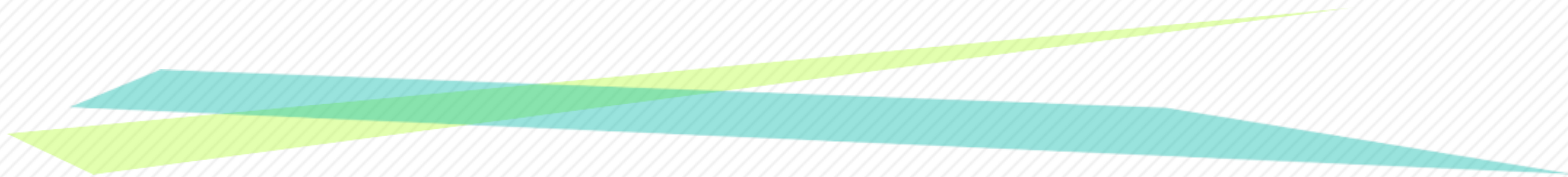


Kebijakan Sektor Riil Awal Orba

Liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing (diberlakukan UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967)

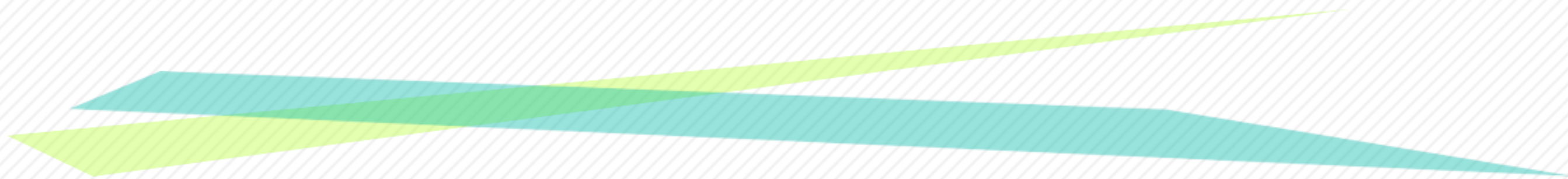
Fokus pembangunan pada sektor pertanian

Sesudah tahun 1970an, pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya



Masa oil Boom

Oil Boom terjadi sebanyak dua kali. Oil Boom pertama terjadi pada tahun 1973/1974, harga minyak di pasar dunia melonjak dari US\$1.67/ barrel (1970) menjadi US\$ 11.70/barrel (1973/1974). Oil Boom kedua terjadi pada tahun (1979/1980). Harga minyak yang telah mencapai US\$ 15.65/ barrel (1979) melonjak lagi menjadi US\$ 29.50/ barrel (1980), terus melonjak US\$ 35.00 (1981 – 1982).



Oil Boom terjadi pada masa Ekonomi Pancasila atau Orde Baru (1966-1998). Pada masa orde baru, di dalamnya terdapat masa stabilisasi dan rehabilitasi dengan masalah pokok yang dihadapi yaitu;

- Meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965c)
- Turunnya produksi nasional di semua sector
- Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari struktur organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan Deputy Menteri Urusan Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri Keuangan.

Pengaruh Positif Oil Boom terhadap Perekonomian Indonesia

Dengan adanya kejadian Oil Boom, naiknya harga minyak (krisis minyak) memberikan keuntungan yang relatif sangat besar kepada Indonesia. Pada kurun waktu tersebut, Indonesia “ketiban pulung” windfall dari kenaikan harga minyak karena pada saat itu Indonesia merupakan eksportir minyak. Kenaikan harga minyak ini, mampu mendorong jumlah “pundi-pundi” devisa negara sehingga pada saat itu untuk sementara keadaan keuangan Indonesia terselamatkan (Anggaran Negara).

Menjelang tahun 1977 perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan struktural yang cukup menyolok, sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah yang ditunjang oleh naiknya harga minyak bumi. Selama dasawarsa setelah tahun 1965, bagian GDP atau PDB yang berasal dari sektor pertanian turun dari 52 % menjadi 35 %, sedangkan bagian GDP yang berasal dari sektor pertambangan telah melonjak dari 3,7 % menjadi 12 %.



Pengaruh Negatif Oil Boom terhadap Perekonomian Indonesia

Bangsa Indonesia menjadi manja, hidupnya boros dan mewah seperti, terlihat :

- Nilai ekspor naik 6,8 per tahun tapi diikuti naiknya nilai impor yang lebih tinggi, yaitu 16,6% per tahun. (Mubyarto, 1988).
- Kebutuhan modal asing (pinjaman lunak) tidak menurun: rata-rata US\$ 562 juta per tahun (1970-1973), malahan meningkat rata-rata US\$ 1,646.9 juta per tahun (1974-1984), (Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI 15-8-1974 dalam Zulkarnain Djamin, 1993).

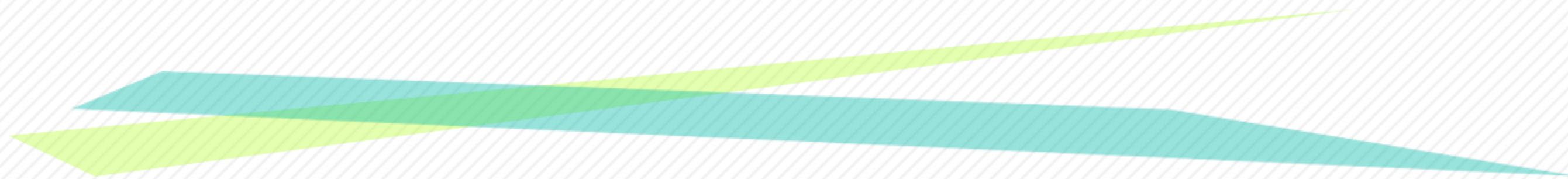
angsa Indonesia menderita penyakit belanda (the Dutch disease), gejalanya terlihat antara lain :

- Laju inflasi dalam negeri lebih tinggi dari inflasi dunia (negara partner dagang) sebagai akibat besarnya monetisasi penerimaan negara dalam valas.
- Defisit APBN (dalam rupiah) ditutup dengan surplus penerimaan (dalam valas). Akibatnya jumlah uang beredar meningkat, inflasi meningkat.
- Laju pertumbuhan yang uang beredar jauh lebih besar, rata-rata 34,9%, lalu pertumbuhan ekonomi rata-rata 8% per tahun selama 1972 – 1981

Kebijakan Pemerintah menghadapi Oil Boom

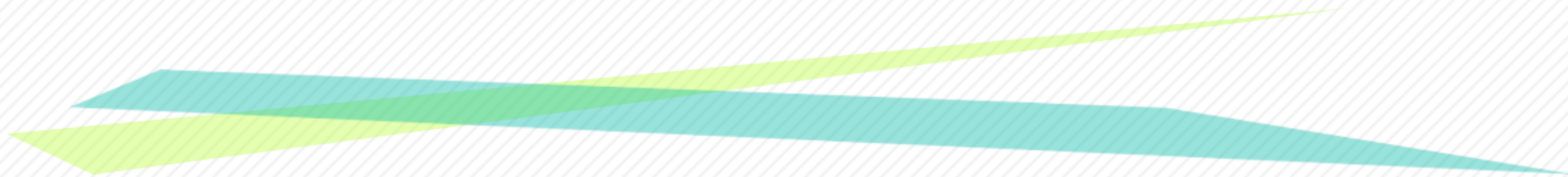
Dikarenakan Oil Boom terjadi pada akhir tahun PELITA I sampai pertengahan tahun PELITA III maka kebijaksanaan tiga PELITA antara lain:

- PELITA I ; sebagian besar anggaran pemerintah dialokasikan di bidang ekonomi, yaitu 78,28%, untuk sektor pertanian dan irigrasi, sektor perhubungan dan pariwisata, industri dan pertambangan serta sektor pedesaan



PELITA II : kebijaksanaan ekonomi periode ini berkisar pada :


- Kebijakan stabilisasi 9 April 1974 (menyangkut aspek moneter, fisik dan perdagangan).
- Kebijakan devaluasi rupiah terhadap dollar AS (kurang lebih 45%) pada bulan Nopember 1978.



PELITA III : Unsur pemertaan lebih ditekankan melalui delapan jalur pemerataan-pemertaan:

- Kebutuhan pokok rakyat (pangan, sandang)
- Kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan
- Pembagian pendapatan
- Perluasan kesempatan kerja
- Usaha, terutama golongan ekonomi lemah
- Kesempatan berpartisipasi (pemuda, wanita)
- Pembangunan antar daerah
- Kesempatan memperoleh keadilan

Krisis Pertamina tahun 1975 telah menaikkan kembali peran teknokrat. Ditambah lagi dengan kasus Malari pada tahun sebelumnya telah mendorong pemerintah memberikan kuasa penuh pada teknokrat untuk mengembangkan strategi pembangunan yang berdimensi pemerataan. Hasil dari perubahan ini tercermin dari berbagai proyek Inpres yang kemudian diakui telah banyak berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.



Pasca Oil Boom

arga minyak mencapai US\$ 35.00/ per barrel (1981 – 1982), menurun lagi menjadi US\$ 29.53/ barrel (1983 – 1984) dan tahun-tahun berikutnya harga berfluktuasi tidak menentu. Sejak tahun 1983 perekonomian Indonesia memasuki masa Pasca Oil Boom (Pasca Bonanza Minyak). Tahun 1986 terjadi goncangan ekonomi akibat merosotnya harga minyak sampai titik terendah US\$ 9,83/ barrel. Program reformasi ekonomi (pemulihan) mulai menampakkan hasil pada tahun 1998.

Masalah-masalah yang dihadapi

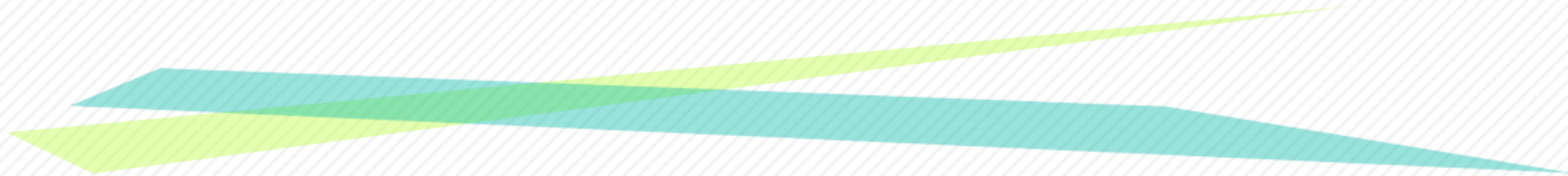
Merosotnya harga minyak di pasar internasional sepanjang tahun 1983 – 1987 menimbulkan masalah berat bagi perekonomian Indonesia karena penerimaan sektor migas menurun; defisit transaksi berjalan dan defisit APBN meningkat.





REFLEKSI

- Informasi penting hari ini
- Manfaat penting dari informasi penting hari ini
- Tindak lanjut yang dapat saudara lakukan





Thank You! 😊

Any Questions?